

## INTEGRASI KEAMANAN PESISIR BERBASIS KOMUNITAS: REVITALISASI SISKAMLING DAN INOVASI GERAKAN JAGA LAUT DI DESA ONA, KEPULAUAN SULA

Sahrul Takim<sup>1\*</sup>, Samsudin Buamona B<sup>2</sup>, Ibrahim Fokaaya<sup>3</sup>

Rafika Umasugi<sup>4</sup>, Prabowo Sibela<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 4, 5</sup>STAI Babussalam Sula Maluku Utara

<sup>3</sup>Polres Kepulauan Sula Maluku Utara

[sahrultakim@staibabussalamsula.ac.id](mailto:sahrultakim@staibabussalamsula.ac.id)<sup>1\*</sup>

[sbuamonab90@staibabussalamsula.ac.id](mailto:sbuamonab90@staibabussalamsula.ac.id)<sup>2</sup>, [ibrahimfokaaya415@gmail.com](mailto:ibrahimfokaaya415@gmail.com)<sup>3</sup>

[rafikaumasugi@gmail.com](mailto:rafikaumasugi@gmail.com)<sup>4</sup>, [prabowosibela@gmail.com](mailto:prabowosibela@gmail.com)<sup>5</sup>

### *Abstract*

*Security in archipelagic regions faces structural challenges due to the imbalance of police personnel ratios and fragmented geographical characteristics. Ona Village in the Sula Islands, as a priority coastal area, experiences double vulnerability regarding conventional criminality on land and fishing gear theft in its waters. This community service program aims to build an integrated security system through the revitalization of Siskamling and the 'Jaga Laut' movement innovation. The implementation method uses Participatory Action Research (PAR), encompassing deliberation stages (Maksaira), capacity building, physical implementation, and system institutionalization based on the local 'Jaga Sula' philosophy. The results indicate the successful formation of a new Siskamling structure with a kinship-based patrol model, significantly increasing citizen participation. Furthermore, the 'Mini Coastal Post' innovation was established as a maritime monitoring center, effectively suppressing theft rates to zero incidents. The synergy between state law and customary law within the Baku Bae (Restorative Justice) mechanism also strengthened social cohesion. This community-based security integration is recommended as a strategic pilot model for other coastal villages to achieve sustainable and inclusive environmental security independence.*

**Keywords:** *Community-Based Security, Jaga Laut, Ona Village, Siskamling,*

### **Abstrak**

Keamanan wilayah kepulauan menghadapi tantangan struktural akibat ketimpangan rasio personel kepolisian dan karakteristik geografis yang terfragmentasi. Desa Ona di Kepulauan Sula, sebagai wilayah pesisir prioritas, mengalami kerentanan ganda berupa ancaman kriminalitas konvensional di darat dan pencurian alat tangkap di perairan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan membangun sistem keamanan terintegrasi melalui revitalisasi Siskamling dan inovasi gerakan "Jaga Laut". Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang meliputi tahapan musyawarah (*Maksaira*), penguatan kapasitas, implementasi fisik, serta pelembagaan sistem berbasis filosofi lokal "Jaga Sula". Hasil kegiatan menunjukkan keberhasilan terbentuknya struktur Siskamling baru dengan model ronda berbasis kekerabatan yang meningkatkan partisipasi warga secara signifikan. Selain itu, inovasi "Pos Pantai Mini" berhasil didirikan sebagai pusat pemantauan aktivitas maritim yang efektif menekan angka pencurian hingga nol kejadian (*zero incident*). Sinergi hukum negara dan hukum adat dalam mekanisme *Baku Bae* (*Restorative Justice*) juga memperkuat kohesi sosial masyarakat. Integrasi keamanan berbasis komunitas ini direkomendasikan sebagai model percontohan strategis bagi desa pesisir lainnya untuk mewujudkan kemandirian keamanan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci:** Desa Ona, Jaga Laut, Keamanan Berbasis Komunitas, Siskamling.

## PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah kepulauan Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks akibat kondisi geografis yang terfragmentasi (Dao et al., 2024). Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Sula, tantangan ini semakin nyata terlihat dari keterbatasan jumlah personel keamanan formal. Data menunjukkan bahwa rasio jumlah polisi berbanding penduduk di wilayah ini mencapai angka 1:1.480, sebuah angka yang jauh dari rasio ideal 1:300 (Kementerian dalam Negeri, 2023, hlm. 56). Ketimpangan ini menyebabkan patroli rutin kepolisian tidak dapat menjangkau seluruh pelosok desa secara intensif setiap saat. Oleh karena itu, paradigma keamanan tidak bisa lagi hanya bergantung pada pendekatan *top-down* dari negara, melainkan harus bertransformasi menjadi keamanan partisipatif (*participatory security*). Revitalisasi Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) menjadi urgensi mutlak untuk menutup celah keamanan tersebut ("Kebijakan Pertahanan Untuk Mencapai Sistem Keamanan Nasional," 2024). Namun, Siskamling konvensional yang hanya berfokus pada ronda malam di darat sering kali tidak relevan dengan karakteristik masyarakat pesisir yang dinamis, sehingga diperlukan adaptasi model pengamanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap lingkungan maritim.

Merespons tantangan tersebut, Polres Kepulauan Sula menginisiasi program inovatif bernama "Jaga Sula" yang menekankan pada kemandirian masyarakat. Filosofi dasar program ini adalah membangun kesadaran kolektif yang dimulai

dari unit terkecil, dengan prinsip: "*Jaga Diri, Jaga Keluarga, Jaga Lingkungan*" (Takim, 2025, hlm. 5). Program ini berupaya mengembalikan nilai-nilai gotong royong yang mulai pudar di tengah masyarakat. Di Desa Ona, implementasi filosofi ini menjadi sangat krusial mengingat posisinya sebagai desa pesisir prioritas yang memiliki kerentanan ganda, baik dari sisi darat maupun laut (Takim, 2025, hlm. 13). Tanpa adanya intervensi penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan intensif, filosofi "Jaga Sula" hanya akan menjadi slogan tanpa aksi nyata. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan untuk membumikan konsep tersebut menjadi praktik keamanan sehari-hari yang terlembaga, mengubah pola pikir warga dari pasif menjadi aktor utama penjaga kampung halamannya sendiri. (Marasabessy et al., 2025)

Secara spesifik, mitra pengabdian di Desa Ona menghadapi permasalahan keamanan yang unik. Selain ancaman tindak pidana konvensional, desa ini memiliki riwayat potensi konflik sosial yang memerlukan penanganan khusus. Tercatat pada tahun 2021, sempat terjadi perselisihan antara Desa Ona dan Desa Kabau yang dipicu oleh masalah pemuda (La Anda, 2025). Selain itu, sebagai masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut, warga Desa Ona menyadari bahwa keamanan laut adalah napas kehidupan mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Ona, "*Kami tidak punya kapal besar, tapi kami punya semangat jaga laut. Kalau laut rusak, kami kehilangan kehidupan*" (La Anda, 2025). Pernyataan ini menegaskan perlunya inovasi "Pos Pantai Mini" dan gerakan "Jaga Laut" untuk melengkapi Siskamling darat. Pengawasan terhadap aktivitas *destructive fishing* atau pencurian alat tangkap tidak bisa dilakukan dari pos ronda di tengah kampung, melainkan memerlukan pos pantau di pesisir yang terintegrasi.

Berdasarkan analisis situasi di atas, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi keamanan pesisir berbasis komunitas melalui revitalisasi Siskamling dan inovasi Jaga Laut. Metode pelaksanaan mengadopsi pendekatan kearifan lokal dengan mekanisme *Baku Bae* (saling berbaikan) untuk penyelesaian sengketa (Takim, 2025, hlm. 53). Melalui pembentukan struktur organisasi yang solid dan penerapan jadwal ronda yang sistematis (Takim, 2025, hlm. 99), diharapkan tercipta sistem deteksi dini yang efektif. Hasil dari kegiatan ini tidak hanya berupa fisik Poskamling yang aktif kembali, tetapi juga terbentuknya pranata sosial baru di mana nelayan berperan ganda sebagai agen keamanan maritim. Sinergi antara hukum positif dan hukum adat dalam bingkai "Jaga Sula" ini diharapkan menjadi model resolusi konflik dan sistem keamanan lingkungan yang berkelanjutan bagi desa-desa pesisir lainnya di Maluku Utara

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai subjek utama yang aktif dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem keamanan di lingkungannya sendiri (Rasyid, 2019).

Kerangka kerja kegiatan mengacu pada filosofi program "Jaga Sula" yang diinisiasi oleh Polres Kepulauan Sula, yaitu transformasi nilai dari "Jaga Diri" menuju "Jaga Keluarga" dan akhirnya "Jaga Lingkungan" (Takim, 2025, hlm. 5). Metode pelaksanaan dibagi menjadi empat tahapan sistematis, yaitu: (1) Tahap Persiapan dan Sosialisasi (*Maksaira*), (2) Tahap Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*), (3) Tahap Implementasi Fisik dan Sistem, serta (4) Tahap Institusionalisasi dan Pendampingan.

#### 1. Tahap Persiapan dan Sosialisasi

Tahap ini dimulai dengan pemetaan sosial melalui musyawarah desa. Forum Group Discussion difasilitasi melibatkan Kepala Desa, tokoh adat, pemuda, dan Bhabinkamtibmas untuk menyamakan persepsi tentang revitalisasi Siskamling. Diidentifikasi kerawanan pesisir dan konflik 2021 dengan desa tetangga. Hasilnya: kesepakatan pembentukan struktur Siskamling terintegrasi pengawasan laut dan penunjukan lokasi pos pantau.

#### 2. Tahap Penguatan Kapasitas

Pelatihan intensif diberikan kepada awak Poskamling dan tim Jaga Laut, mencakup teknis kepolisian dasar, komunikasi, pelaporan ke *Command Center*, batasan wewenang, manajemen konflik (*Restorative Justice/Baku Bae*), serta struktur organisasi Siskamling.

#### 3. Tahap Implementasi Fisik dan Sistem

Masyarakat gotong royong merevitalisasi Poskamling dan mendirikan Pos Pantai Mini untuk pengawasan maritim (pencurian mesin, nelayan asing). Sistem giliran berbasis marga/keluarga dilengkapi kentongan, senter, buku mutasi, dan nomor darurat. Integrasi pos darat-laut melalui komunikasi satu pintu ke aparat.

#### 4. Tahap Institusionalisasi dan Pendampingan

Dibantu penyusunan SOP Ronda Malam dan Penanganan Tamu (1x24 jam) berdasarkan pedoman Jaga Sula, alokasi Dana Desa, serta formalisasi Baku Bae di Rumah Perdamaian. Diakhiri simulasi tanggap darurat untuk uji kesiapan sistem.

Pendekatan partisipatif semacam ini memungkinkan komunitas untuk menjadi agen perubahan aktif, tidak hanya dalam mengatasi masalah keamanan tetapi juga dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang sesuai dengan konteks local (Kusumayanti et al., 2025; Mu'awanah et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Revitalisasi Siskamling: Model Ronda Berbasis Kekerabatan

Revitalisasi sistem keamanan lingkungan di Desa Ona melibatkan restrukturisasi fundamental yang mengintegrasikan aspek sosiologis masyarakat. Model jadwal ronda sebelumnya berbasis zonasi blok terbukti tidak efektif karena

ikatan emosional antarpetugas yang lemah. Program ini memperkenalkan sistem "Gilir Jaga Berbasis Marga/Keluarga", di mana regu jaga disusun berdasarkan kekerabatan, sehingga meningkatkan partisipasi melalui kontrol sosial internal (Fauzi et al., 2025).

Kepala Desa Ona, Bapak La Anda Buton, menegaskan efektivitas sistem baru:

"Dulu kalau jadwal pakai sistem blok, banyak yang alasan sakit atau capek. Tapi sekarang kita ubah pakai sistem keluarga. Dalam satu malam, yang jaga itu satu rumpun keluarga atau tetangga yang sangat dekat. Hasilnya, mereka lebih rajin turun karena malu sama keluarga sendiri kalau absen. Poskamling jadi ramai bukan cuma buat jaga, tapi juga silaturahmi keluarga."

Prosedur diperkuat melalui Standar Operasional Prosedur Ronda Malam berbasis pedoman Siskamling Jaga Sula, termasuk lapor tamu 1x24 jam dan kode kantong standar: 1 kali untuk patroli, 2 kali untuk pencurian, 3 kali untuk kebakaran, dan 4 kali untuk bencana alam. Hal ini mencegah kepanikan dan memastikan respons tepat.



*Dokumentasi 1. Pelaksanaan Lapor Tamu 1x24 Jam di Desa Ona*



*Al-Dima*

*Dokumentasi 3. Peresmian Pos Ronda Di Desa Ona oleh Kapolres Kepulauan Sula*

Kepala Regu Jaga, Amirudin, menyatakan dampak SOP:

"SOP tamu wajib lapor 1x24 jam itu dulu cuma tulisan di portal, tidak pernah jalan. Sekarang kami tegas. Setiap ada orang baru masuk, petugas ronda langsung data dan lapor ke grup WhatsApp desa. Pernah ada orang asing mencurigakan masuk tengah malam, karena SOP jalan, kami bisa langsung cegat dan tanya tujuannya. Warga jadi merasa lebih tenang tidur malam."

Operasional didukung modernisasi alat komunikasi, seperti *Handy Talky* yang terhubung dengan Bhabinkamtibmas dan Polsek Sulabesi Barat, memungkinkan pelaporan real-time dan sinergi antara kearifan lokal serta teknologi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga dicapai melalui pemanfaatan teknologi digital, memungkinkan warga untuk mengakses informasi terkini mengenai kegiatan Siskamling dan pelaporan insiden, yang sebelumnya terbatas pada forum-forum informal (Nisa et al., 2024; Siregar & Halking, 2025).



Dokumentasi 4 Peyerahan Sovenir dari Kapolres Sula Kepada Anggota Siskamling Desa Ona

## 2. Inovasi Gerakan 'Jaga Laut': Menjaga Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

Inovasi utama kegiatan pengabdian ini adalah perluasan keamanan lingkungan melalui gerakan "Jaga Laut". Sebelumnya, Siskamling di Desa Ona



Dokumentasi 5. Sosialisasi Gerakan Jaga Laut Di Desa Ona

terbatas pada pemukiman darat, mengabaikan pesisir "halaman depan" desa yang rentan terhadap pencurian mesin tempel, rumput laut, dan penangkapan ikan destruktif. Untuk mengatasinya, dibentuk Kelompok Kerja Jaga Laut dalam struktur Siskamling, dengan mendirikan "Pos Pantai Mini" di titik strategis pesisir. Pos ini berfungsi sebagai menara pantau dan pusat informasi nelayan, mengubah pengawasan dari reaktif menjadi proaktif. Filosofi gerakan ini berakar pada kesadaran bahwa laut adalah ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya, sesuai nilai "Jaga Lingkungan" dalam konsep Jaga Sula. Kepala Desa Ona, La Anda Buton, menyatakan:

"Kami sadar, kami tidak punya kapal patroli besar seperti Polairud, tapi kami punya semangat jaga laut yang besar. Bagi orang Ona, laut itu piring makan kami. Kalau laut rusak atau tidak aman, itu sama saja kami kehilangan kehidupan. Jadi, Jaga Laut ini bukan beban, tapi kebutuhan."



*Dokumentasi 6.. Kegiatan Patroli Partisipatif*

Secara operasional, pengawasan di Pos Pantai Mini menerapkan "Patroli Partisipatif", di mana nelayan bertindak sebagai "mata dan telinga" Siskamling (Puluhulawa et al., 2023). Mereka melaporkan aktivitas mencurigakan, seperti kapal asing atau bom ikan, melalui isyarat atau radio. Dampaknya, nelayan merasakan peningkatan rasa aman dalam memarkir perahu dan menyimpan alat. Tokoh nelayan Rusli, anggota Pokja Jaga Laut, menyatakan:

"Dulu, hampir tiap bulan ada saja warga yang hilang mesin ketinting. Kami mau tidur nyenyak susah, harus angkut mesin berat ke rumah tiap sore. Tapi sejak ada Pos Pantai Mini dan giliran jaga di pesisir, Alhamdulillah sudah tidak ada lagi kejadian pencurian. Orang dari luar yang mau buat kacau di laut kami jadi mikir dua kali karena lihat ada pos yang selalu menyala lampunya di pinggir pantai."



Dokumentasi 7. Hasil Tangkapan Ikan Laut Masyarakat Desa ONa

Kesuksesan gerakan "Jaga Laut" di Desa Ona membuktikan bahwa keamanan maritim tidak selalu membutuhkan teknologi militer canggih. Dengan modal sosial (gotong royong), struktur organisasi yang jelas, dan sarana pendukung sederhana seperti Pos Pantai Mini, masyarakat mampu menciptakan *deterrent effect* (efek gentar) bagi pelaku kejahatan. Inovasi ini sekaligus mengukuhkan posisi Desa Ona sebagai model percontohan desa pesisir tangguh di Kepulauan Sula, di mana keamanan darat dan laut dikelola dalam satu tarikan napas komunitas.

### 3. Integrasi Penanganan Konflik: Pendekatan '*Baku Bae*'

Keberhasilan sistem keamanan lingkungan tidak hanya diukur dari absennya gangguan fisik, tetapi juga kemampuan komunitas mengelola konflik sosial agar tidak eskalasi menjadi kekerasan (Arsal et al., 2022). Di masyarakat Kepulauan Sula yang heterogen dan taat adat, hukum formal sering dianggap kaku dan merusak silaturahmi. Oleh karena itu, revitalisasi keamanan di Desa Ona mengadopsi *Restorative Justice* berbasis kearifan lokal bernama "*Baku Bae*", yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada hukuman. Dalam struktur Siskamling baru, petugas ronda berperan sebagai mediator awal (*first responder*) untuk konflik ringan seperti perkelahian pemuda, sengketa tanah, atau kesalahpahaman tetangga. Kasus tidak langsung dilimpahkan ke polisi, melainkan dimusyawarahkan di forum adat oleh "Tiga Tungku": Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Adat. Kantor desa menjadi "Rumah Perdamaian" untuk *win-win solution*.

Pendekatan ini terinspirasi konflik antar Desa Ona dan Desa Kabau tahun 2021, di mana hukum formal gagal hapus dendam, sedangkan budaya berhasil redakan ketegangan (Makkawaru et al., 2013). Tokoh Adat Desa Ona, Bapak Usman, menjelaskan: "Kalau bawa ke polisi, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dendam turun ke anak cucu. '*Baku Bae*' selesaikan secara adat: pelaku akui salah, korban maafkan, sanksi sosial ingatkan. Polisi saksi bahwa hukum negara hormati adat, kecuali kejahatan berat."



Dokumentasi 9 Penyelesaian Konflik Masyarakat dengan Pendekatan Lokal Sula (*Baku Bae*)

Sinergi hukum negara dan adat ini beri kepastian hukum dan kenyamanan sosial. Bhabinkamtibmas pastikan tidak langgar HAM, tokoh adat sesuaikan sanksi norma lokal (S, 2021). Dampaknya, perkara polisi berkurang, kohesi sosial kuat. Warga berani lapor karena mekanisme kekeluargaan. Siskamling Desa Ona kini jadi "penjaga malam" sekaligus "penjaga harmoni". ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap keamanan yang mengintegrasikan pengawasan fisik dengan resolusi konflik berbasis komunitas, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial (Falaq & Munna, 2025; Muhlizi, 2013).

#### **4. Dampak Kegiatan: Mewujudkan Rasa Aman dan Kohesi Sosial**

Implementasi revitalisasi Siskamling dan inovasi "Jaga Laut" di Desa Ona menghasilkan dampak signifikan, mengubah keamanan desa dari rentan menjadi tangguh. Secara kuantitatif, laporan pencurian alat tangkap nelayan dan gangguan malam hari menurun hingga nol insiden dalam tiga bulan terakhir. Kehadiran Poskamling dan Pos Pantai Mini menciptakan efek penangkalan (*deterrent effect*) serta rasa aman bagi warga, khususnya istri nelayan.

Dampak sosial melampaui keamanan fisik, dengan revitalisasi modal sosial melalui budaya gotong royong dan filosofi "Jaga Sula". Poskamling menjadi ruang interaksi antargenerasi, mengurangi individualisme. Ibu Nurhayati menyatakan: "Dulu kalau malam suasana desa sepi dan mencekam... Rasanya desa jadi lebih kompak."



*Dokumentasi 10. Gotong Royong Pembuatan Jembatan Darurat di Desa Ona*

Secara kelembagaan, pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa untuk Siskamling melalui Peraturan Desa, termasuk insentif dan perawatan peralatan (Zakariya, 2021). Model ini menjadi percontohan Polres Kepulauan Sula bagi desa pesisir lain. habinkamtibmas Desa Ona menegaskan: "Dampaknya sangat terasa... masyarakat sudah menjadi 'polisi' bagi lingkungannya sendiri." Secara keseluruhan, pendekatan partisipatif ini mengatasi keterbatasan aparat di wilayah kepulauan melalui sinergi Siskamling, "Jaga Laut", dan "*Baku Bae*", menciptakan ekosistem keamanan mandiri dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **1. Revitalisasi Modal Sosial sebagai Basis Kekuatan Keamanan Mandiri**

Keberhasilan program revitalisasi keamanan di Desa Ona tidak dapat dilepaskan dari strategi penguatan modal sosial (*social capital*) yang berakar pada kearifan lokal masyarakat Sula. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan fisik Pos Kamling dan Pos Pantau hanyalah "cangkang" atau sarana, sementara "ruh" yang menghidupkannya adalah bangkitnya kembali nilai *Mana Wa Lima* (saling membantu) dan *Kit Mua-Mua ta Basanohi* (kita semua bersaudara). Program "Jaga Sula" berhasil menempatkan pendekatan kultural ini sebagai katalisator, mengubah paradigma keamanan yang semula bersifat sentralistik (bergantung pada Polisi) menjadi partisipatif.

Dalam teori sosiologi keamanan, hal ini membuktikan bahwa ikatan emosional dan kekerabatan yang kuat dalam komunitas pedesaan merupakan instrumen kontrol sosial yang jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum formal semata (Domínguez & Montolio, 2021). Ketika warga Desa Ona bergotong royong membangun pos dan sukarela menyusun jadwal jaga, mereka sebenarnya sedang merekonstruksi sistem pertahanan sosial mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan analisis dalam buku sumber yang menyebutkan bahwa pendekatan humanis dan kultural mampu mereduksi resistensi masyarakat dan

justru memicu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap ketertiban lingkungan mereka (Gunawan et al., 2023).

## 2. Efektivitas Model Integrasi Keamanan "Amfibi" (Darat dan Laut)

Keunikan dan nilai kebaruan utama dari kegiatan pengabdian di Desa Ona terletak pada implementasi model keamanan terintegrasi atau yang dapat diistilahkan sebagai model keamanan "amfibi", yang mencakup dimensi darat dan laut secara simultan. Pembahasan mengenai hal ini sangat krusial mengingat mayoritas model Siskamling di Indonesia umumnya hanya berfokus pada dimensi daratan (*land-oriented*) (Kherid & Aminah, 2019). Inovasi gerakan "Jaga Laut" yang diinisiasi oleh pemuda Desa Ona dengan memanfaatkan perahu *longboat* dan teknologi sederhana membuktikan bahwa prinsip *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) dapat diadaptasi secara fleksibel sesuai karakteristik geografis wilayah. Secara operasional, keberadaan patroli laut menutup celah keamanan (*security gap*) yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku *illegal fishing*. Sinergi antara pos darat dan pos laut menciptakan mekanisme pengawasan berlapis (*layered security*). Ketika jalur laut diawasi, akses masuk bagi pelaku kejahatan atau distribusi barang terlarang (Misbach et al., 2022).

## 3. Dampak Penangkalan dan Institusionalisasi Penyelesaian Konflik

Penurunan drastis angka kriminalitas di Desa Ona, bahkan hingga mencapai titik nol kasus pada tahun 2025 sebagaimana data Polsek Sulabesi Barat, mengindikasikan bekerjanya efek penangkalan (*deterrence effect*) yang efektif. Kehadiran fisik petugas ronda yang konsisten dan patroli laut yang terjadwal menciptakan persepsi di kalangan calon pelaku kejahatan bahwa kesempatan untuk melakukan aksi tanpa terdeteksi sangatlah kecil. Dalam kriminologi, ini dikenal sebagai *Situational Crime Prevention*, di mana lingkungan didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan risiko bagi pelaku kejahatan (Jacques & Reynald, 2011).

Lebih dari itu, efektivitas program ini juga didorong oleh institusionalisasi mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan *Restorative Justice* berbasis adat *Bau Pia*. Pos Kamling di Desa Ona telah bertransformasi fungsi menjadi "Rumah Keadilan" tingkat desa. Konflik-konflik mikro seperti kesalahpahaman antar-pemuda tidak lagi dibiarkan membesar menjadi tawuran atau dilaporkan ke ranah hukum pidana yang memakan biaya sosial tinggi, melainkan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Hal ini menjelaskan mengapa beban kerja kepolisian formal berkurang dan harmoni sosial warga tetap terjaga. Sinergi antara hukum negara dan hukum adat inilah yang menjadi kunci stabilitas keamanan di Desa Ona.

## KESIMPULAN

Program pengabdian di Desa Ona, Kepulauan Sula, membuktikan bahwa integrasi keamanan darat dan laut berbasis komunitas efektif mengatasi keterbatasan jangkauan aparat di wilayah kepulauan. Hasil kegiatan menunjukkan tiga poin utama. Pertama, revitalisasi Siskamling dengan "gilir jaga berbasis

marga" meningkatkan partisipasi warga secara aktif. Pendekatan ini lebih berkelanjutan daripada sistem zonasi kaku karena menyentuh nilai kekerabatan. *Kedua*, gerakan "Jaga Laut" melalui Pos Pantai Mini mengisi celah pengawasan pesisir. Sinergi "Jaga Darat" dan "Jaga Laut" membentuk deteksi dini komprehensif, terbukti dari nol kasus pencurian alat tangkap selama pemantauan. *Ketiga*, filosofi "Jaga Sula" via *Baku Bae* mengubah penyelesaian konflik dari litigasi ke restoratif berbasis adat. Hal ini mengurangi beban polisi (rasio 1:1.480) dan menjaga kohesi sosial. Desa Ona kini memiliki ketahanan mandiri yang reaktif terhadap kejahatan dan proaktif menjaga harmoni serta sumber daya laut. Model ini menekankan keamanan partisipatoris berbasis kearifan lokal, bukan sentralistik.

Berdasarkan evaluasi, berikut saran untuk keberlanjutan program:

1. Pemerintah Desa dan Masyarakat: Formalisasikan Siskamling Terpadu dalam Peraturan Desa untuk alokasi Dana Desa rutin pada operasional dan perawatan. Masyarakat pertahankan jadwal jaga berbasis marga guna jaga ikatan sosial.
2. Polres Kepulauan Sula: Jadikan Desa Ona sebagai pilot project "Kampung Jaga Sula" untuk desa pesisir serupa. Replikasi model Pos Pantai Mini dan Poskamling, serta latih Pokja Jaga Laut oleh Polair tentang hukum laut dan keselamatan pelayaran.
3. Akademisi dan Pengabdian: Kembangkan aspek ekonomi kelompok jaga, seperti koperasi nelayan "Jaga Laut", agar keamanan berjalan seiring kesejahteraan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dukungan pendanaan dan administratif yang memastikan kelancaran program ini. Dukungan fasilitas dan kepercayaan tersebut menjadi fondasi utama bagi tim untuk berkontribusi menyelesaikan masalah masyarakat.

Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh. Hartanto, S.I.K., inisiator program "Jaga Sula". Visi pemolisian humanis berbasis kearifan lokal beliau menjadi inspirasi utama kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Satuan Binmas Polres Kepulauan Sula dan Kapolsek Sulabesi Barat serta Bhabinkamtibmas Desa Ona sebagai mitra strategis, fasilitator pelatihan, dan pendamping warga.

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Ona, khususnya Kepala Desa La Anda Buton, perangkat desa, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama. Keterbukaan Kepala Desa terhadap inovasi dan dukungan Tokoh Adat pada mekanisme Baku Bae menjadi kunci keberhasilan integrasi sistem keamanan. Terakhir, kepada masyarakat Desa Ona dalam hal ini; pemuda, nelayan Jaga Laut, dan ibu-ibu PKK—atas kontribusi waktu, tenaga, dan pikiran merevitalisasi Siskamling.

Semangat "Jaga Diri, Jaga Keluarga, Jaga Lingkungan" mencerminkan esensi kehidupan masyarakat Sula.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsal, T., Setyowati, D. L., Hardati, P., & Atmaja, H. T. (2022). PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI BUDAYA LOKAL. *Bookchapter Alam Universitas Negeri Semarang, 1*, 47–69. <https://doi.org/10.15294/ka.v1i1.85>
- Dao, Y., Yusnaldi, Y., & Kusuma. (2024). Defense Strategies in Safeguarding Maritime Security in Indonesia's Outermost Small Islands. *Politeia Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 2(4), 115–128. <https://doi.org/10.61978/politeia.v2i4.379>
- Domínguez, M., & Montolio, D. (2021). Bolstering community ties as a mean of reducing crime. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 191, 916–945. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.09.022>
- Falaq, F., & Munna, N. N. (2025). Rembuk Blok dan Tepo Seliro: Menegakkan Harmoni Melalui Nilai Hukum Adat di Rutan Jepara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.831>
- Fauzi, H., Salim, M., & undefined, B. (2025). *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 5 No. 4 Desember 2025*.
- Gunawan, I., Setyoko, P. I., & Tobirin, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 7(2), 722. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2023.7.2.9541>
- Jacques, S., & Reynald, D. M. (2011). *The Offenders' Perspective on Prevention: Guarding Against Victimization and Law Enforcement*. <https://doi.org/10.21428/7b6d533a.18b86d1b>
- Kebijakan Pertahanan Untuk Mencapai Sistem Keamanan Nasional. (2024). *Jurnal Pewarta Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10085>
- Kherid, M. N., & Aminah, A. (2019). INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME. *LAW REFORM*, 15(2), 258–274. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26185>
- Kusumayanti, F., Prakoso, I. A., & Gafallo, M. F. Y. (2025). Empowerment of fishermen's wives through management of agriculture products in Tanjung Saleh, Kubu Raya Regency. *Community Empowerment*, 10(9), 1801–1808. <https://doi.org/10.31603/ce.13325>
- Makkawaru, Z., Taba, H., & Tira, A. (2013). *Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat*. 4(2), 154435.
- Marasabessy, Z. A., Adam, A., Dufri, I., Werfewubun, J., & Silim, S. (2025). PELATIHAN PEMANFAATAN AI BAGI GURU DALAM MERANCANG MATERI AJAR BERBASIS TEKNOLOGI DI. *MARTABE*,

8(1), 79–93.

- Misbach, A., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2022). PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN LAUT MELALUI SINERGI ANTAR INSTANSI PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1561>
- Mu'awanah, M., Arosy, H. N., Roqim, M., & Purnomo, A. W. C. (2024). Menjadi Asik Tanpa Mengusik: Mencegah Bullying Melalui Moderasi Beragama. *NAJWA Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 115–132. <https://doi.org/10.30762/najwa.v2i2.312>
- Muhlizi, A. F. (2013). BANTUAN HUKUM MELALUI MEKANISME NONLITIGASI SEBAGAI SALURAN PENGUATAN PERADILAN INFORMAL BAGI MASYARAKAT ADAT. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.82>
- Nisa, N., Herman, H., D, A. T. M., & Fauziyah, F. (2024). Optimising the Supervision of the Use of Village Funds through the Digital-Based Village Guard Program at the Bantaeng District Attorney's Office. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), 921. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i2.59558>
- Puluhulawa, F. U., Harun, A. A., & Mamu, K. Z. (2023). Public Participation in Regulation on the Protection of Marine Resources. *E3S Web of Conferences*, 440, 1003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344001003>
- Rasyid, Y. (2019). Participatory Action Research (PAR) as a Research Approach for Sustainable Community Development: A Case Study in Pulau Mantanani, Sabah. In *World sustainability series* (pp. 671–696). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-15604-6\\_41](https://doi.org/10.1007/978-3-030-15604-6_41)
- S, B. S. E. (2021). PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 7(1), 51–71. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>
- Siregar, D. S., & Halking, H. (2025). SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (KELURAHAN KENANGAN BARU KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 851–862. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6597>
- Zakariya, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 6(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>